Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI OENINO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Dearestson Selan[1], Maria M. Lino[2], Mariayani O. Rene[3], Belandina L. Long[4]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nusa Cendana, Indonesia[1,2,3,4]
E-mail: dirrselan@gmail.com[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program BOS, seperti keterbatasan dana, penggunaan dana yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan peserta didik, kurang optimalnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta rendahnya transparansi dalam pelaporan dana BOS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BOS di SMP Negeri Oenino telah berjalan, namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai pengelolaan dana BOS telah dilakukan, meskipun masih terdapat kendala dalam koordinasi. Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah tenaga serta minimnya dana menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Dari aspek disposisi, pelaksana memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan, namun masih menghadapi berbagai kendala teknis. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi telah tersedia prosedur pelaksanaan yang mengacu pada petunjuk teknis BOS, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas agar implementasi kebijakan BOS dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), George C. Edward III, Pendidikan, SMP Negeri Oenino.*

ABSTRACT

Dearestson Selan, Thesis 2026, Implementation of School Operational Assistance (BOS) Policy at Oenino State Junior High School, South Central Timor Regency.

Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Nusa Cendana University, supervised by Dr. Maria M. Lino, M. Si. and Mariayani O. Rene, S.AB, M.AP. This study aims to describe and analyze the implementation of the School Operational Assistance (BOS) Policy at Oenino State Junior High School, South Central Timor Regency. The research was motivated by the continued discovery of various problems in the implementation of the BOS program, such as limited funds, the use of funds that are not fully in accordance with student needs, less than optimal effectiveness and efficiency of budget use, and low transparency in BOS fund reporting. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation with informants consisting of the principal, BOS treasurer, teachers, school committee, and other related parties. Data analysis uses the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study uses George C. Edward III's policy implementation theory which includes four dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the BOS policy at Oenino State Junior High School has been running, but not optimally. From the communication aspect, the dissemination of information regarding the management of BOS funds has been carried out, although there are still obstacles in coordination. In terms of resources, limited number of personnel and minimal funds are obstacles in program implementation. From a dispositional perspective, implementers are committed to implementing the policy, but still face various technical challenges. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, implementation procedures are in place that refer to the BOS technical guidelines, but their implementation is not yet fully effective. Therefore, human resource capacity building, budget management optimization, strengthened coordination, and increased transparency and accountability are needed to ensure more effective BOS policy implementation and support improved educational quality at Oenino Public Junior High School, South Central Timor Regency.

Keyword: *Inhibiting Factors, Thesis, Final Project, Public Administration, Internal Factors, External Factors.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, konstitusi melalui Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sebagai bentuk komitmen negara dalam mewujudkan amanat tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dari masyarakat.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang lahir sejak tahun 2005 sebagai respons atas

kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan biaya pendidikan, meringankan beban masyarakat, sekaligus memastikan tidak ada peserta didik miskin yang putus sekolah karena alasan finansial. Melalui BOS, sekolah dapat membiayai kebutuhan operasional seperti pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, dan honorarium tenaga pendidik.

Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan BOS tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai permasalahan kerap ditemukan di lapangan, mulai dari keterbatasan dana, penggunaan yang tidak sesuai kebutuhan siswa, rendahnya transparansi pelaporan, hingga lemahnya koordinasi antarpihak yang terlibat. Kondisi ini semakin kompleks di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dengan sumber daya manusia yang terbatas.

SMP Negeri Oenino yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu sekolah yang mengandalkan dana BOS sebagai sumber pendanaan utama. Dengan 144 peserta didik, di mana 80% berasal dari keluarga kurang mampu, efektivitas pengelolaan BOS menjadi sangat krusial. Identifikasi awal menunjukkan sejumlah permasalahan, antara lain: minimnya dana BOS yang diterima, penggunaan dana yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan siswa, kurang transparannya pelaporan, serta beban ganda guru yang merangkap sebagai pengelola BOS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan BOS di SMP Negeri Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif pelaku implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri Oenino, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa SMP Negeri Oenino merupakan sekolah yang berlokasi di daerah terpencil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga implementasi BOS menjadi krusial.

Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih secara purposive, terdiri dari: Kepala Sekolah (1 orang), Bendahara BOS (1 orang), Operator BOS (1 orang), Guru (2 orang), Ketua

Komite Sekolah (1 orang), dan Wali Murid (4 orang). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Observasi lapangan terhadap kondisi fisik sekolah dan proses pengelolaan BOS; (2) Wawancara mendalam dengan para informan; dan (3) Studi dokumentasi terhadap RKAS, laporan BOS, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum SMP Negeri Oenino

SMP Negeri Oenino didirikan pada tahun 2010 dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional 50309184. Sekolah ini melayani 144 peserta didik yang terbagi dalam enam rombongan belajar. Dari total peserta didik, 80% berasal dari keluarga kurang mampu dengan penghasilan orang tua di bawah Rp. 500.000 per bulan. Kondisi ini menjadikan BOS sebagai sumber pendanaan utama yang sangat vital bagi kelangsungan operasional sekolah.

Tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 20 orang, terdiri dari 1 kepala sekolah, 4 guru PNS, 12 guru Non-PNS (PPPK dan honorer), serta tenaga tata usaha dan penjaga sekolah. Keterbatasan jumlah tenaga kependidikan khusus menyebabkan sejumlah guru harus merangkap tugas sebagai pengelola administrasi BOS, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan.

2. Implementasi BOS Berdasarkan Teori Edwards III

a. Komunikasi

Transmisi kebijakan BOS di SMP Negeri Oenino dilakukan melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten TTS. Kepala sekolah kemudian meneruskan informasi kepada bendahara, operator, guru, komite, dan wali murid. Kepala Sekolah (Ajub J. E. Selan, S.Pd) menyatakan bahwa pihak sekolah selalu mengikuti bimtek pengelolaan BOS dari dinas terkait dan mensosialisasikannya kepada warga sekolah.

Namun, kejelasan komunikasi masih menghadapi kendala. Tidak semua pengelola BOS memiliki kemampuan mengakses informasi digital, sehingga sebagian pengelola belum memahami sepenuhnya aturan penggunaan dana BOS yang termuat dalam petunjuk teknis daring. Kondisi ini sejalan dengan temuan Edwards III bahwa ketidakjelasan pesan dapat menimbulkan kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan.

Aspek konsistensi menunjukkan hasil yang cukup baik; pihak sekolah secara konsisten mengikuti perubahan petunjuk teknis BOS dan melakukan sosialisasi ulang setiap kali terdapat pembaruan kebijakan.

b. Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala paling signifikan. Dengan hanya 4 guru PNS dari total 16 tenaga pendidik, beban kerja masing-masing guru sangat tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kewajiban merangkap sebagai tim pengelola BOS yang terdiri dari 20 orang, di mana hampir seluruh guru dilibatkan dalam tim tersebut.

Keterbatasan fasilitas teknologi informasi juga menjadi hambatan serius. Koneksi internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat komputer mempersulit pelaporan penggunaan dana BOS secara daring, yang merupakan kewajiban yang disyaratkan untuk penyaluran BOS tahap berikutnya. Hal ini senada dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan hanyalah dokumen yang belum teroperasionalisasi.

Ketersediaan informasi mengenai penggunaan BOS kepada komite dan wali murid telah dilakukan secara berkala, yaitu setiap enam bulan sekali. Komite sekolah menyatakan bahwa informasi penggunaan BOS selalu disosialisasikan sebelum pelaksanaan dan dapat diakses melalui papan pengumuman sekolah.

c. Disposisi

Aspek disposisi menunjukkan hasil yang bervariasi antaraktor. Kepala sekolah menunjukkan komitmen yang baik dalam implementasi BOS, tercermin dari konsistensinya mengikuti bimtek, menyusun RKAS sesuai ketentuan, dan mengawasi penggunaan dana. Namun, komitmen ini belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh tim pelaksana BOS.

Bendahara BOS mengakui adanya kesulitan dalam menyelaraskan rencana penggunaan dana dengan kebutuhan riil sekolah, mengingat keterbatasan dana yang diterima. Kondisi ini terkadang mendorong pengambilan keputusan penggunaan dana di luar RKAS yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, keterlibatan aktif komite sekolah dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan BOS merupakan indikator positif disposisi kolektif. Para wali murid juga mengakui manfaat nyata program BOS bagi anak-anak mereka, meskipun masih mengharapkan peningkatan transparansi pengelolaan.

d. Struktur Birokrasi

Petunjuk Teknis BOS yang diterbitkan pemerintah pusat berfungsi sebagai SOP pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, SOP tersebut telah tersedia dan diimplementasikan di SMP Negeri Oenino. Mekanisme pelaporan mencakup empat jalur: (1) Pelaporan online melalui aplikasi RKAS; (2) Pelaporan offline berupa SPJ/kwitansi; (3) Penerbitan surat oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (SP2B BOS); dan (4) Rekonsiliasi Aset.

Namun, fragmentasi pemahaman antar pelaksana menjadi hambatan tersendiri. Perbedaan pemahaman

antara kepala sekolah, bendahara, dan guru tentang tujuan dan mekanisme BOS menyebabkan koordinasi yang kurang optimal. Kondisi ini menghambat implementasi yang menyeluruh dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung

Tabel 1.Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi BOS di SMP Negeri Oenino

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Komunikasi	Sosialisasi rutin dari Dinas Pendidikan; Kepala sekolah aktif meneruskan informasi	Keterbatasan akses digital; Tidak semua pengelola memahami juknis online
Sumber Daya	Informasi BOS tersedia; Komite dilibatkan aktif	SDM terbatas; Guru merangkap tugas; Fasilitas TI tidak memadai; Dana minim
Disposisi	Komitmen kepala sekolah baik; Komite terlibat aktif dalam pengawasan	Komitmen kolektif belum optimal; Keterbatasan dana mendorong penyimpangan RKAS
Struktur Birokrasi	SOP berupa Juknis BOS tersedia dan diikuti; Mekanisme pelaporan telah berjalan	Fragmentasi pemahaman antar pelaksana; Koordinasi belum optimal

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, implementasi kebijakan BOS di SMP Negeri Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan secara keseluruhan belum berjalan secara optimal. Temuan penelitian berdasarkan empat dimensi Edwards III dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, aspek komunikasi, transmisi kebijakan BOS telah dilaksanakan melalui sosialisasi berjenjang dari Dinas Pendidikan kepada sekolah dan warga sekolah. Namun, kejelasan dan konsistensi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait keterbatasan akses teknologi informasi di daerah terpencil.

Kedua, aspek sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala paling signifikan. Guru yang merangkap sebagai pengelola BOS menyebabkan pengelolaan tidak optimal, yang berimbas pada keterlambatan pelaporan. Keterbatasan fasilitas teknologi informasi juga menghambat pelaporan dana BOS secara daring.

Ketiga, aspek disposisi, kepala sekolah menunjukkan komitmen yang cukup baik, namun komitmen kolektif dari seluruh pengelola BOS belum optimal. Keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan dan pengawasan merupakan indikator positif yang perlu diperkuat.

Keempat, aspek struktur birokrasi, SOP berupa Petunjuk Teknis BOS telah tersedia dan diikuti. Mekanisme pelaporan telah berjalan melalui empat jalur. Namun, fragmentasi pemahaman antar pelaksana menghambat koordinasi yang efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi: (1) Pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan Kabupaten TTS perlu meningkatkan frekuensi dan

kualitas pelatihan bagi pengelola BOS di sekolah terpencil, termasuk pelatihan teknologi informasi; (2) Kepala SMP Negeri Oenino perlu memperkuat koordinasi internal antara kepala sekolah, bendahara, operator, guru, dan komite sekolah; (3) Bendahara dan operator BOS perlu meningkatkan kapasitas dalam penggunaan system pelaporan daring; (4) Komite sekolah perlu meningkatkan peran aktif dalam pengawasan penggunaan dana BOS; dan (5) Perlu dikaji kemungkinan penambahan anggaran BOS bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A. &Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 1-10.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press.

Kemendikbud. (2023). Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Nugroho, R. (2008). Kebijakan Pendidikan yang Unggul. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

Subarsono, A. G. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Syafaruddin. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: RinekaCipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.